

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994)
- Adami Chazawi, 2013. Tindak Pidana Pornografi. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatahan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab). Malang: Bayumedia.
- Azimah Soebagijo, 2008 Pornografi Dilarang Tapi Dicari, Jakarta : Gema Insani.
- Andi Hamzah, 1987, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan, Jakarta: Bina Mulia
- Andi Sofyan dan Nur Azisa 2016,Hukum Pidana Pustaka Pena Press,Makassar
- Amir Iyas , 2012. Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta
- Dicky Putra Arumawan, 2015. Implementasi Penegakan Sanksi Pidana. FH UM. Surakarta
- Edi Warman, 2012. Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia.
- J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni,1979)
- Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Masroah, Intan Tri, Elviera Gamelia, and Bambang Hariyadi. 2015 "Perilaku Seksual Remaja Akibat Paparan Media Pornografi." Kesmas Indonesia: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat.
- Mudzakkir, Kajian terhadap Ketentuan Pemidanaan dalam Draft RUU KUHP, disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP, diselenggarakan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

- Moeljatno, 1985 dalam Dicky Putra Arumawan, 2016. Muhammad Chirzin. Pornografi dan Pornoaksi dalam Prespektif Alquran, Musawwa Jurnal Studi Jender dan Islam.
- Maskun, 2011, Pengantar Cybercrime, Pustaka Pena Press: Makassar
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992)
- Rizki Oktavia, 2015. Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui Media Elektronik
- Rika Saraswati, 2015 Hukum Perlindungan Anak di indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. Syarifah, Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi.
- Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982),
- Suratman dan Andri Winjaya Laksana, 2014, "pembaharuan jurnal hukum, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Jakarta. Jurnal Kertha Wicara.
- Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Wagiati Soetodjo, 2006 Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama.
- Wirjono Projodikoro, 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama.

Jurnal

- Ida Bagus Made Danu Krisnawan, "Tindak Pidana Kesopanan Dibidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Dengan Hukum Pidana Adat", Udayana Master Law Journal, Magister Hukum Udayana, Juli 2015, ISSN 2302-528x, Vol. 4, No. 2, : 281 – 291.
- Masroah, Intan Tri, Elviera Gamelia, and Bambang Hariyadi. "Perilaku Seksual Remaja Akibat Paparan Media Pornografi." Kesmas Indonesia: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat 7.3 (2015): 244-255.

Muhammad Chirzin. Pornografi dan Pornoaksi dalam Prespektif Alquran, Musawwa Jurnal Studi Jender dan Islam, Vol 4 2006.

Suratman dan Andri Winjaya Laksana, 2014, "pembaharuan jurnal hukum, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi", Jakarta. Jurnal Kertha Wicara Vol 9 No.8 Tahun 2020:1-9.

Randy Pradityo, Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, November 2016 : 319 – 330.

Peraturan perundang-undangan

KUHP (kitab undang – undang hukum pidana).

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi transaksi elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi Pasal 1 butir 1 bahwa : Anak yang menjadi pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat Tindak Pidana Pornografi.

LAMPIRAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 507219_584606, FAX (0411) 507219_590846 MAKASSAR 90245 E-mail fh.uh@indosat.net.id

Nomor : 9248/UN4.5.1/PT.01.04/2021
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 November 2021

Kepada
Yth

Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A

Di -
Tempat

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Nizwar Zulkifli
Nomor Pokok : B012192020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Penetapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008

Pembimbing : Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS. (Ketua)
Dr. Nur Azisa ,SH.,MH (Anggota)

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi
Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H.,M.H.,M.A.P.
NIP.19731231 199903 1003

Tembusan

- 1 Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
- 2 Mahasiswa yang bersangkutan
- 3 Arsip



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
M A K A S S A R 90111

Makassar, 22 November 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ *186* /PB.01/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SIL,MIL.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Andi Nizwar Zulkifli.**
Nomor Pokok : B012192020
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (S2)
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku
Penyebaran Konten Pornografi Menurut
Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2008.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan 17 November 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 10 November 2021 Nomor : 9248/UN4.5.1/PT.01.04 /2021.


KETUA
DR. IBRAHIM PALINO, SIL,MIL.
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.